

**LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022
BULAN FEBRUARI DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Senin, 7 Maret 2022

B. Pimpinan Rakor

Sekretaris Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Pejabat Struktural pada Sekretariat dan Bidang
2. Pejabat Fungsional
3. Admin pada masing-masing unit kerja
4. Pelaksana pada masing-masing unit kerja

D. Notulis

Pelaksana Sub Bag Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

- a. Fisik = 14,42 %
- b. Keuangan = 1.810.950.315 (9,55%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	2.401.250.000			22.553.930		
1	Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)	2.401.250.000	10	0,94	22.553.930	(9,06)	Pelatihan PPEP belum berjalan di bulan Februari dikarenakan kendala narasumber

							DPRD (dalam masa reses)
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	199.400.000			25.896.900		
1	Persiapan Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.269.000	27,64	0	0	(27,64)	Pelaksanaan rapat ditunda karena menyesuaikan kebutuhan
2	Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	195.131.000	15,38	13,26	25.896.900	(2,12)	sesuai dengan kebutuhan
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	675.000			0		
1	Koordinasi Pengembangan Kapasitas Petugas Penunjang	675.000	44	0	0	(44)	pelaksanaan pada bulan april

	Layanan Perempuan dan Anak Kab/Kota						
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi							
	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	12.967.000			1.161.160		
1	Persiapan kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	12.967.000	30,93	8,96	1.161.160	(21,97)	Menyesuaikan kebutuhan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat							
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	59.338.000			1.219.797		
1	Persiapan Pelatihan HAM Bagi Kelompok Perempuan Rentan	1.374.000	100	50,51	670.457	(49,49)	Menyesuaikan waktu pelaksanaan kegiatan
2	Pelaksanaan pelatihan HAM bagi Kelompok Perempuan Rentan	9.694.000	69,90	5,66	549.340	(64,24)	Perubahan metode pelaksanaan kegiatan dan menunggu hasil koordinasi dengan stakeholder terkait.
3	Persiapan Penguatan Peran	7.466.000	100	0	0	(100)	Kegiatan ditunda

	Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW						pelaksanaannya menyesuaikan BKOW
4	Pelaksanaan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW	16.294.000	100	0	0	(100)	Kegiatan ditunda pelaksanaannya menyesuaikan BKOW
5	Kegiatan Operasional DWP Tahun 2020	7.860.000	33,33	0	0	(33,33)	Belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu kesiapan aplikasi e-blankon
6	Kegiatan Perjalanan Dinas DWP Provinsi Jawa Tengah ke Kab/ Kota	16.650.000	10	0	0	(10)	Tidak jadi dilaksanakan menimbang perkembangan kondisi pandemi
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi							
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	140.120.000			13.381.120		
1	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Data Gender dan Anak	140.120.000	15,42	4,78	13.381.120	(10,64)	Rakor SIGA untuk Kab/Kota dan OPD/Instansi Vertikal Provinsi yang dijadwalkan dilaksanakan pada bulan

							Februari 2022 belum bisa dilaksanakan karena menyesuaikan waktu dari narasumber dan situasi pandemi yang naik pada bulan Februari 2022.
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi							
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000				0	
1	Rapat Koordinasi APSAI (Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia)	2.000.000	100	0		0 (100)	Kegiatan ditunda pelaksanaannya
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	20.616.000				0	
1	Rapat Koordinasi Jejaring Kelembagaan Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	18.680.000	51,82	0		0 (51,82)	Belum bisa dilaksanakan diakibatkan anggaran akan digunakan untuk kegiatan situasional di desa Wadas
2	Persiapan Rapat Koordinasi Jejaring Kelembagaan Penyedia	1.936.000	100	0		0 (100)	pelaksanaan kegiatan ditunda untuk penyesuaian

Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus						dengan lokasi kegiatan
Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatif s/d Bulan ini :	15	0	0			
Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan	1	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

Pada bulan Februari terdapat 10 kegiatan yang berdeviasi negatif yaitu

1. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan berdeviasi negatif karena ada beberapa sub kegiatan dan sub-sub kegiatan yang belum terealisasi pada Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi yaitu ada 12 SSK:
 - Pendampingan Pelaksanaan PUG di Kab/Kota dan rencana pelaksanaan mulai bulan April di Kab/Kota.
 - Fasilitasi PPRG Desa dan rencana akan dilaksanakan pada bulan Oktober.
 - Penyusunan Kebijakan PPRG, masih menunggu hasil revidi dan analisis terhadap produk hukum terkait PUG.
 - Workshop Penyusunan PPRG bagi OPD Provinsi, dengan efisiensi honorarium fasilitator menyesuaikan kebutuhan.
 - Evaluasi Pelaksanaan PUG, menunggu informasi resmi dari kementerian PPPA.
 - Evaluasi Pelaksanaan PUG Kab/Kota, menunggu jadwal resmi dari kementerian PPPA.
 - Workshop Penyusunan PPRG bagi OPD Kab/Kota, rencana akan dilaksanakan pada bulan Maret.
 - Rapat Persiapan Pendidikan Gender bagi Pelajar SMA/SMK, rencana akan dilaksanakan pada bulan Juli.
 - Sosialisasi Pendidikan Gender bagi Pelajar SMA/SMK, rencana akan dilaksanakan pada bulan Agustus.
 - Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Gender bagi Pelajar SMA/SMK, rencana akan dilaksanakan pada bulan September.
2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemsayarakatan Kewenangan Provinsi ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP), dimana pada bulan Februari belum berjalan dikarenakan kendala narasumber DPRD (dalam masa rases).
3. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota da 2 SSK yang berdeviasi negatif yaitu
 - Persiapan Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota, dimana pelaksanaan rapat di tunda karena menyesuaikan kebutuhan.

- Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota, dimana pelaksanaan rapat di tunda karena menyesuaikan kebutuhan.
4. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Koordinasi Pengembangan Kapasitas Petugas Penunjang Layanan Perempuan dan Anak Kab/Kota, dimana akan dilaksanakan pada bulan April.
 5. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Persiapan Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi, pelaksanaan akan menyesuaikan kebutuhan.
 6. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi ada 6 SSK yang berdeviasi negatif yaitu :
 - Persiapan Pelatihan HAM bagi Kelompok Perempuan Rentan , dimana pelaksanaan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan.
 - Pelaksanaan Pelatihan HAM bagi Kelompok Perempuan Rentan, dimana ada perubahan metode pelaksanaan kegiatan dan menunggu hasil koordinasi dengan stakeholder terkait.
 - Persiapan Penguatan Peran serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna Organisasi Perempuan yang tergabung dalam BKOW, dimana pelaksanaan kegiatan di tunda karena menyesuaikan BKOW.
 - Pelaksanaan penguatan Peran serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna Organisasi Perempuan yang tergabung dalam BKOW, dimana pelaksanaan kegiatan di tunda karena menyesuaikan BKOW.
 - Kegiatan Operasional DWP Tahun 2020, belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu kesiapan aplikasi e-blankon.
 - Kegiatan Perjalanan Dinas DWP Provinsi Jawa Tengah ke Kab/Kota, tidak jadi dilaksanakan dikarenakan menimbang perkembangan kondisi pandemi.
 7. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Data Gender dan Anak, dimana Rakor SIGA untuk Kab/Kota dan OPD/Instansi Vertikal Provinsi yang dijadwalkan dilaksanakan pada bulan Februari 2022 belum bisa dilaksanakan karena menyesuaikan waktu dari narasumber dan situasi pandemi yang naik pada bulan Februari 2022.
 8. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Rapat Koordinasi APSAI (Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia), dimana pelaksanaan kegiatan ditunda.
 9. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ada 2 SSK yang berdeviasi negatif yaitu :
 - Rapat Koordinasi Jejaring Kelembagaan Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus, dimana kegiatan belum bisa dilaksanakan diakibatkan anggaran akan digunakan untuk kegiatan situasional di desa Wadas.
 - Persiapan Rapat Koordinasi Jejaring Kelembagaan Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus, dimana pelaksanaan kegiatan ditunda untuk penyesuaian dengan lokasi kegiatan.
 10. Adanya perbedaan satuan antara di aplikasi E-blankon dan di DPA.

Upaya

Upaya mengatasi permasalahan di 10 kegiatan yang berdeviasi negatif yaitu perlu adanya Koordinasi terkait persiapan pelaksanaan kegiatan dengan pihak terkait dan stakeholder, jadwal diubah sesuai kebutuhan di bulan Desember, serta pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setelah aplikasi e-blankon siap dan pelaksanaan kegiatan

dilaksanakan secara offline/daring serta akan dilaksanakan menunggu perkembangan situasi dan kondisi di lokasi pelaksanaan serta perlu adanya penyesuaian satuan antara di aplikasi E-blangkon dan DPA.

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

Rencana Kegiatan di Bulan Maret sebagai berikut :

Sekretariat :

1. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
2. Pengadaan sarana prasarana
3. Penyimpanan Perlengkapan kantor
4. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5. Administrasi umum perangkat daerah
6. Administrasi keuangan perangkat daerah
7. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
8. Penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
9. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
10. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah

Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi (PPEP)
3. Pemantauan dan pengawasan PPT (3 kab kota)
4. Kegiatan GSIB (Gerakan Sayang Ibu dan Bayi)

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak

1. Honorarium Non ASN
2. Rapat Fan Jateng
3. Rakor PUSPAGA
4. Persiapan & pelaksanaan advokasi pengembangan KIE AMPK
5. Persiapan & pelaksanaan advokasi pembentukan PATBM (honor non asn)
6. Persiapan & pelaksanaan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak
7. Pemantauan advokasi kebijakan perlindungan anak

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan KIE

1. Kegiatan Orientasi Peningkatan Kapasitas PPKBD
2. Penggerakan dan baksos Aisyiyah

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

1. Kegiatan Workshop penyusunan review GDPK
2. Sosialisasi gerakan jokawin bocah melalui kegiatan kepompok BKR

Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

1. Persiapan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak serta Stunting
2. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak serta Stunting
3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Jawa Tengah
4. Pelaksanaan Pelatihan HAM bagi Kelompok Perempuan Rentan

5. Persiapan Penguatan peran serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rangkaian HUT BKOW 2022
6. Pelaksanaan Penguatan peran serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rangkaian HUT BKOW

V. PENUTUP

Kesimpulan pra rapat koordinasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah sebagai berikut :

Stressing Pengendalian

1. Para Kepala Bidang atau pejabat fungsional pada seksi agar selalu mencermati target dan realisasi pencapaian kinerja kegiatan
2. Masing-masing bidang agar mematuhi pelaksanaan kegiatan sesuai awal perencanaan yang ada di e-rko, sehingga dapat meminimalisir terjadinya deviasi.
3. Percepatan penyerapan anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun
4. Para Kepala Bidang atau pejabat fungsional pada seksi agar mencermati kembali indikator capaian di RPJMD, renstra, renja dan progressnya.

Capaian realisasi fisik dan keuangan Dinas Perempuan dan Anak sampai dengan bulan Februari, sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Deviasi
1	Dinas Perempuan dan Anak	12,89	14,42	9,55	1,53
2	Sekretariat	15,63	17,69	12,03	2,07
3	Bidang KHPP	9,39	4,52	4,18	(4,87)
4	Bidang PHPA	9,60	14,27	12,20	4,67
5	Bidang KB KIE	4,35	16,00	0,84	11,64
6	Bidang DALDUK KS	1,27	8,13	7,51	6,86
7	Bidang Data Parmas	12,69	15,38	9,18	2,70

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Februari 2022, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Senin 7 Maret 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**



Dra. RETNO SUDEWL, Apt,MSi,MM

NIP. 196811241993102001